



Pengaruh Kinerja Perusahaan, Tingkat Utang, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan

Alif Rizqi Cendekia, Anggun Anggraini

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

alifrizky1798@gmail.com, dosen02156@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, sedangkan pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 13. Populasi penelitian terdiri atas 101 perusahaan dan berdasarkan kriteria pemilihan sampel diperoleh 32 perusahaan, kemudian setelah proses eliminasi outlier digunakan 26 perusahaan dengan total 130 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan, yang berarti peningkatan kinerja perusahaan diikuti peningkatan PPh Badan terutang. Tingkat utang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan, menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam penelitian ini cenderung mendukung aktivitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan laba dan pajak terutang. Sementara itu, biaya operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Badan, sehingga peningkatan biaya operasional cenderung menurunkan PPh Badan terutang. Secara simultan, kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan dengan Adjusted R-squared sebesar 96,42%. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan dan operasional perusahaan secara bersama-sama berperan penting dalam menentukan besarnya kewajiban PPh Badan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan otoritas pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan efektif.

Kata kunci: Kinerja Perusahaan, Tingkat Utang, Biaya Operasional, Pajak Penghasilan Badan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of company performance, debt level, and operating expenses on Corporate Income Tax (CIT) among food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This research employs a quantitative approach with an associative research design. The data used are secondary data obtained from companies' financial statements, while data processing was conducted using EViews 13. The research population consisted of 101 companies. Based on the sample selection criteria, 32 companies were selected, and after the elimination of outliers, 26 companies remained, resulting in 130 observations. The analysis was conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM). The results show that company performance has a positive and significant effect on Corporate Income Tax, indicating that improved company performance is followed by an increase in Corporate Income Tax payable. Debt level also has a positive and significant effect on Corporate Income Tax, indicating that debt utilization tends to support business activities and contribute to increased profits and tax liabilities. Meanwhile, operating expenses have a negative and significant effect on Corporate Income Tax, indicating that higher operating expenses tend to reduce Corporate Income Tax payable. Simultaneously, company performance, debt level, and operating expenses have a significant effect on Corporate Income Tax, with an Adjusted R-squared value of 96.42%. These findings indicate that financial and operational policies jointly influence corporate tax obligations and provide useful considerations for management and tax authorities.

Keywords: Company Performance, Debt Level, Operating Expenses, Corporate Income Tax.

1. Pendahuluan

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memegang peranan vital dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas fiskal Indonesia. Di antara berbagai jenis pajak yang dikelola pemerintah, Pajak Penghasilan (PPh) Badan menempati posisi strategis karena mencerminkan kontribusi nyata sektor korporasi

terhadap penerimaan negara. Dalam lima tahun terakhir, kinerja PPh Badan menunjukkan tren positif yang menandakan ketahanan ekonomi nasional serta keberhasilan reformasi perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PPh Badan dan Penerimaan Pajak Nasional

Tahun	Realisasi PPh Badan	Total Penerimaan Pajak	Proporsi (%)
2020	202.311.027.906.415	1.072.114.566.093.390	18,9%
2021	250.369.354.417.097	1.229.581.016.340.000	20,4%
2022	385.419.889.955.147	1.716.763.787.853.500	22,5%
2023	440.551.934.430.772	1.818.240.000.000.000	24,2%
2024	387.077.585.197.700	1.931.610.653.765.590	20,0%

Sumber: Laporan keuangan DJP, 2020-2025. Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi PPh Badan meningkat signifikan dari Rp202,31 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp250,37 triliun pada 2021, kemudian melonjak tajam hingga Rp440,55 triliun pada 2023. Kenaikan ini berbanding lurus dengan peningkatan proporsinya terhadap total penerimaan pajak nasional, yaitu dari 18,87% pada 2020 menjadi 24,23% pada 2023. Meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp387,07 triliun atau sekitar 20,03% dari total penerimaan pajak, kinerja tersebut masih mencerminkan daya tahan sektor korporasi di tengah fluktuasi ekonomi global.

Kinerja PPh Badan yang solid itu juga mendapat pengakuan dari pemerintah. Menurut artikel DDTCNews yang dikutip pada tanggal 02 Januari 2024, Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan PPh Badan pada 2023 tumbuh sebesar 20,3% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhannya tidak setinggi lonjakan tahun sebelumnya, segmen korporasi masih mampu mencetak pertumbuhan double digit. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa realisasi ini melampaui ekspektasi awal dan menegaskan bahwa PPh Badan tetap menjadi kontributor terbesar kedua bagi penerimaan pajak nasional (Kurniati, 2024). Hal ini membuktikan bahwa kontribusi PPh Badan tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga strategis dalam menopang stabilitas fiskal dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Kinerja positif PPh Badan tidak lepas dari fondasi kebijakan fiskal dan kemajuan reformasi administrasi pajak. Pemerintah menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 % melalui UU No. 2 Tahun 2020 dan mempertahankannya dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 agar tidak mengikis insentif dunia usaha dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian (Fitriya, 2024). Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan korporasi. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan transformasi digital melalui sistem Coretax, yang bertujuan memperkuat transparansi, efisiensi, dan integrasi antara sistem pajak dan layanan publik lainnya (Priyono, 2025). Meski digitalisasi idealnya mempercepat pelaporan dan pembayaran, belum semua implementasi berjalan mulus berita CNBC Indonesia menyebut bahwa digitalisasi pajak melalui Coretax masih belum maksimal dan perlu diperbaiki demi mendukung efektivitas penerimaan pajak (Madjid, 2025).

Sejalan dengan penguatan kebijakan dan modernisasi sistem perpajakan tersebut, kinerja positif PPh Badan juga turut ditopang oleh kontribusi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Salah satu subsektor yang berperan signifikan dalam menopang penerimaan PPh Badan adalah subsektor Food and Beverage (F&B), yang menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan positif di tengah dinamika industri manufaktur. Subsektor Food and Beverage (F&B) menjadi salah satu pendorong penting penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di tengah dinamika kinerja sektor manufaktur nasional. Berdasarkan laporan DDTCNews (2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa terdapat beberapa subsektor manufaktur yang berkinerja baik dalam tahun berjalan ini antara lain seperti industri kimia dan farmasi, makanan dan minuman, serta logam dasar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa subsektor makanan dan minuman memiliki daya tahan relatif lebih baik dibandingkan subsektor manufaktur lainnya di tengah penurunan aktivitas industri secara umum.

Meski demikian, Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa setoran pajak dari industri pengolahan atau manufaktur turun sebesar 13,8% dalam tahun berjalan ini, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak masih mencapai 25,3% dari total nasional (Wildan, 2024). Hal ini menegaskan peran strategis

subsektor F&B sebagai bagian dari kelompok manufaktur yang masih mampu mempertahankan kinerja positifnya dan menjadi salah satu penopang penerimaan PPh Badan di tengah tekanan industri.

Di tengah peran strategisnya dalam menopang penerimaan PPh Badan nasional, subsektor makanan dan minuman yang tergolong dalam industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memperlihatkan dinamika menarik dari sisi pelaporan dan kepatuhan pajak korporasi. Meskipun subsektor ini dikenal memiliki kinerja keuangan yang stabil serta kontribusi signifikan terhadap basis pajak nasional, terdapat indikasi bahwa beban PPh Badan yang dilaporkan belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan laba perusahaan. Fenomena tersebut dapat diamati melalui analisis laporan keuangan dan praktik perpajakan beberapa emiten utama seperti PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ)

Pada tahun 2020, PT Mayora Indah Tbk mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp2,68 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, beban pajak kini mengalami penurunan dari Rp661,31 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp576,42 miliar pada tahun 2020 (Laporan Keuangan MYOR, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan beban PPh Badan tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan laba komersial, yang mengindikasikan adanya pengaruh faktor fiskal di luar kinerja operasional murni perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mencatat aset pajak tangguhan sebesar Rp104,88 miliar dan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp15,26 miliar, yang mencerminkan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal akibat perbedaan metode pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Laporan Keuangan MYOR, 2020).

Fenomena serupa juga terlihat pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Pada tahun 2020, perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp1,10 triliun, namun arus kas menunjukkan pembayaran pajak penghasilan yang relatif besar, yaitu sebesar Rp321,09 miliar (Laporan Keuangan UL TJ, 2020).. Perbedaan antara laba akuntansi dan pajak yang dibayarkan ini mengindikasikan adanya rekonsiliasi fiskal yang signifikan, baik berupa koreksi fiskal positif maupun negatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya PPh Badan tidak hanya ditentukan oleh tingkat laba perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak, perbedaan temporer dan permanen, serta strategi pengelolaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan oleh perusahaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika PPh Badan pada level korporasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan tarif atau kepatuhan administratif, melainkan juga oleh faktor-faktor internal perusahaan yang menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Dengan kata lain, variasi antara kinerja keuangan dan beban pajak yang dilaporkan menggambarkan adanya hubungan erat antara kemampuan profitabilitas perusahaan dan kontribusinya terhadap penerimaan PPh Badan secara agregat. Oleh karena itu, untuk memahami fluktuasi penerimaan PPh Badan dalam periode 2020–2024, perlu ditinjau lebih dalam faktor-faktor fundamental yang memengaruhi kapasitas badan usaha dalam menyeter pajak. Fluktuasi penerimaan PPh Badan selama periode 2020–2024 tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan refleksi dari faktor-faktor fundamental yang memengaruhi kapasitas badan usaha dalam menyeter pajak. Faktor fundamental yang diduga memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pertama adalah Kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan umumnya diukur melalui profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar laba kena pajak sehingga PPh Badan cenderung meningkat. Namun, peningkatan laba juga dapat mendorong manajemen melakukan pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak. Penelitian Anggraeni dan Arief (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap PPh Badan, sedangkan Nainggolan dan Febriansyah (2021) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Tingkat utang (*leverage*) menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan umumnya diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin tinggi utang, semakin besar beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto secara fiskal, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan PPh Badan terutang. Penelitian Sucipto dan Hasibuan (2022) menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap PPh Badan, sedangkan Apipih dan Finatariyani (2024) menemukan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai pengaruh tingkat utang terhadap PPh Badan.

Selain itu, biaya operasional juga dapat memengaruhi besarnya PPh Badan karena sebagian biaya operasional dapat menjadi pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Semakin besar biaya yang dapat dibebankan secara

fiskal, semakin rendah laba kena pajak sehingga PPh Badan terutang cenderung menurun. Penelitian Sjahputra dan Hunein (2024) menemukan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Badan, sedangkan Magdalena dkk. (2024) menemukan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh biaya operasional dapat berbeda berdasarkan karakteristik sektor industri.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, pengaruh kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional terhadap PPh Badan masih perlu diteliti lebih lanjut. Perusahaan subsektor makanan dan minuman dipilih karena memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta karakteristik produk yang merupakan kebutuhan pokok, sehingga relatif mampu mempertahankan pendapatan dan laba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional terhadap PPh Badan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan dari kompleksitas latar belakang serta adanya inkonsistensi temuan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang berjudul: **"Pengaruh Kinerja Keuangan, Tingkat Utang, dan Biaya Operasional Terhadap PPh Badan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2024"**.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme untuk menguji hipotesis melalui analisis data statistik (Sugiyono, 2025:16). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2025:65). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh Kinerja Perusahaan (X1), Tingkat Utang (X2), dan Biaya Operasional (X3) terhadap PPh Badan (Y), baik secara parsial maupun simultan.

2.2 Operasional Variabel

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam satu tahun pajak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan pembaruan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 klikpajak mekari, (2019:2). Dalam penelitian ini, PPh Badan terutang digunakan sebagai variabel dependen karena mencerminkan besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara setelah memperhitungkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku. Secara operasional, PPh Badan terutang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{PPh Badan} = \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan laba. Pengukurannya menggunakan rasio keuangan, khususnya profitabilitas melalui *Return on assets* (ROA), yang merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset (Alamsyahbana dkk., 2024:47). Semakin tinggi ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Laba bersih tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal.

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Corporate Finance Institute, 2020)

Tingkat Utang

Tingkat utang dalam penelitian ini diartikan sebagai sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Pengukuran tingkat utang menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan (Brigham & Houston, 2022). Penggunaan utang dapat memberikan manfaat pajak melalui beban bunga sebagai *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi laba fiskal dan PPh Badan terutang. Hal ini sejalan dengan *trade-off theory*, yang menjelaskan bahwa perusahaan mempertimbangkan manfaat pajak dari utang dengan risiko keuangan yang ditimbulkan oleh beban bunga (Myers, 2021). Secara operasional, tingkat utang diukur menggunakan DER dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: (Corporate Finance Institute, 2020).

Biaya operasional

Biaya operasional atau biaya usaha muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas perusahaan dalam menjual barang atau jasa serta menjalankan administrasi umum. Dalam akuntansi manajerial, biaya operasional diklasifikasikan sebagai biaya non-manufaktur (*non-manufacturing costs*). Menurut Garrison dkk, (2021:30) biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar proses produksi fisik barang. Secara umum, biaya operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Biaya Penjualan} + \text{Biaya Administrasi dan Umum}$$

Sumber: (Sembiring dkk, 2024)

2.3 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, dengan jumlah populasi sebanyak 101 perusahaan. Data penelitian diperoleh melalui laporan keuangan dan informasi perusahaan yang tersedia pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

2.4 Sampel

Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada ketersediaan data yang relevan, mencakup kinerja perusahaan, Tingkat Utang, serta biaya operasional yang telah disesuaikan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Perhitungan variabel penelitian dilakukan menggunakan Microsoft Excel, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 13. Selanjutnya, proses seleksi sampel disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penarikan Sampel

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024		101
2	Perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasikan <i>annual report</i> lengkap dan jelas periode 2019-2023	(44)	57
3	Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami laba selama periode penelitian yaitu pada tahun 2020-2024	(23)	34

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah
4	Perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan dengan informasi lengkap atas seluruh variabel penelitian.	(2)	32
Jumlah perusahaan yang masuk ke dalam sampel			32
Data Outlier			6
Jumlah perusahaan setelah outlier			26
Jumlah perusahaan yang menjadi sample setelah outlier			130
Sumber : Data sekunder diolah dengan Excel 2023			

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 01/07/26 Time: 23:22				
Sample: 2020 2024				
	PPh Badan	Kinerja Perusahaan	Tingkat Utang	Biaya Operasional
Mean	26.087454	27.472254	0.119185	0.382023
Median	25.942000	27.365000	0.082500	0.261000
Maximum	29.051000	30.482000	0.952000	2.546000
Minimum	23.785000	25.496000	0.003000	0.003000
Std. Dev.	1.211420	1.261269	0.137219	0.428591
Skewness	0.482674	0.569889	4.138838	2.259011
Kurtosis	2.732349	2.583063	22.636283	10.314615
Jarque-Bera	5.435805	7.978376	2459.727	400.3789
Probability	0.066013	0.018515	0.000000	0.000000
Sum	3391.369	3571.393	15.49400	49.66300
Sum Sq. Dev.	189.3125	205.2130	2.428956	23.69601
Observations	130	130	130	130

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian. Variabel Pajak Penghasilan Badan (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,087454 dengan standar deviasi sebesar 1,211420. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel PPh Badan relatif stabil dengan tingkat penyebaran data yang rendah. Nilai tertinggi sebesar 29,05093 dicatat oleh Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2023, sedangkan nilai terendah sebesar 23,78460 dimiliki oleh Cisadane Sawit Raya Tbk. pada tahun 2020.

Variabel Kinerja Perusahaan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 27,47225 dengan standar deviasi sebesar 1,261269. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa kinerja perusahaan selama periode penelitian relatif stabil dengan tingkat penyebaran data yang rendah. Nilai tertinggi sebesar 30,48211 dicatat oleh Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2024, sedangkan nilai terendah sebesar 25,49569 dimiliki oleh Cisadane Sawit Raya Tbk. pada tahun 2020.

Variabel Tingkat Utang (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,119185 dengan standar deviasi sebesar 0,137219. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat utang memiliki variasi data yang relatif tinggi selama periode penelitian. Nilai tertinggi sebesar 0,95228 dicatat oleh Mayora Indah Tbk. pada tahun 2023, sedangkan nilai terendah sebesar 0,00347 dimiliki oleh Austindo Nusantara Jaya Tbk. pada tahun 2020.

Variabel Biaya Operasional (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,38202 dengan standar deviasi sebesar 0,42859. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa biaya operasional memiliki tingkat variasi data yang relatif tinggi. Nilai tertinggi sebesar 2,54558 dicatat oleh Sawit Sumbermas Sarana Tbk. pada tahun 2023, sedangkan nilai terendah sebesar 0,00317 dimiliki oleh Mulia Boga Raya Tbk. pada tahun 2023.

3.2 Pemilihan Model Regresi Panel

1. Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.569827	-25,101	0.0000
Cross-section Chi-square	271.48797	25	0.0000

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Mengacu pada tabel 4, bahwa probabilitas pada cross-sections chi-square adalah 0,0000, berdasarkan hasil tersebut bahwa nilai *probability cross-section chi square* < nilai 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *fixed effect model* lebih tepat dalam mengestimasi persamaan regresi.

2. Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman

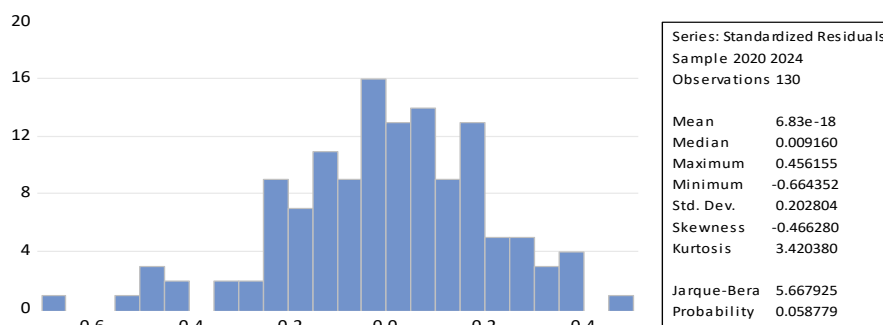
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.258388	3	0.0000

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Mengacu pada tabel 5, nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa nilai tersebut < nilai 0,05 yang berarti *fixed effect model* lebih tepat dalam mengestimasi persamaan regresi. Oleh karena itu Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak dilakukan karena kedua uji *chow* dan uji *hausman* mengeluarkan hasil model yang sama yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Mengacu pada gambar 1. diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,058779. Dimana nilai pada tabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan begitu, uji normalitas dinyatakan memenuhi syarat dan data dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	Kinerja Perusahaan	Tingkat Hutang	Biaya Operasional
Kinerja Perusahaan	1.000000	0.089534	0.344231
Tingkat Utang	0.089534	1.000000	-0.170295
Biaya Operasional	0.344231	-0.170295	1.000000

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Mengacu pada Tabel 6., hasil uji korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,8. Korelasi X1 (Kinerja Perusahaan) dengan X2 (Tingkat Utang) sebesar 0,089534, X1 dengan X3 (Biaya Operasional) sebesar 0,344231, dan X2 dengan X3 sebesar -0,170295. Dengan demikian, seluruh nilai korelasi berada di bawah batas 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak terindikasi mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.45274	1.368669	-0.330786	0.74149
Kinerja Perusahaan	0.02122	0.049917	0.425161	0.67162
Tingkat Utang	0.19733	0.211360	0.933641	0.35272
Biaya Operasional	0.00735	0.072651	0.101107	0.91967

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan glejser test menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 0.05, varians residual bersifat homoskedastisitas dan terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

R-squared	0.971974	Mean dependent var	26.08745
Adjusted R-squared	0.964204	S.D. dependent var	1.211420
S.E. of regression	0.229198	Akaike info criterion	0.085276
Sum squared resid	5.305690	Schwarz criterion	0.724957
Log likelihood	23.45704	Hannan-Quinn criter.	0.345200
F-statistic	125.0994	Durbin-Watson stat	2.135272
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Berdasarkan Tabel 8, nilai statistik Durbin–Watson (DW) yang diperoleh sebesar 2,1352752. Dengan jumlah observasi (N) sebanyak 130 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,6667 dan batas atas (dU) sebesar 1,7610, serta nilai $4 - dL$ sebesar 2,3333 dan $4 - dU$ sebesar 2,2390. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW berada di antara dU dan $4 - dU$ ($1,7610 < 2,135272 < 2,2390$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

3.4 Analisis Regresi berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.169558	2.547877	3.598902	0.0005
Kinerja Perusahaan	0.611876	0.092924	6.584691	0.0000
Tingkat Utang	2.820643	0.393462	7.168786	0.0000
Biaya Operasional	-0.596565	0.135246	-4.410965	0.0000

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Dari hasil uji tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel berikut:

$$Y = 9.169558 + 0.611876 X_1 + 2.820643 X_2 + -0.596565 X_3 + e$$

Konstanta (α) sebesar 9,169558 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu kinerja perusahaan (X_1), tingkat utang (X_2), dan biaya operasional (X_3), bernilai nol, maka nilai Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar 9,169558 satuan. Nilai tersebut menunjukkan nilai dasar PPh Badan sebelum dipengaruhi oleh variabel independen dalam model penelitian.

Koefisien regresi kinerja perusahaan (X_1) sebesar 0,611876 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kinerja perusahaan sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, akan meningkatkan PPh Badan sebesar 0,611876 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar PPh Badan yang terutang.

Koefisien regresi tingkat utang (X_2) sebesar 2,820643 menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat utang sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan PPh Badan sebesar 2,820643 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar PPh Badan yang terutang.

Koefisien regresi biaya operasional (X_3) sebesar -0,596565 menunjukkan bahwa setiap peningkatan biaya operasional sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, akan menurunkan PPh Badan sebesar 0,596565 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya operasional perusahaan, semakin kecil PPh Badan yang terutang.

3.5 Uji koefisien determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.971974	Mean dependent var	26.08745
Adjusted R-squared	0.964204	S.D. dependent var	1.211420
S.E. of regression	0.229198	Akaike info criterion	0.085276
Sum squared resid	5.305690	Schwarz criterion	0.724957
Log likelihood	23.45704	Hannan-Quinn criter.	0.345200
F-statistic	125.0994	Durbin-Watson stat	2.135272
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Mengacu pada Tabel 10., nilai *Adjusted R-squared* tercatat sebesar 0,964204 atau setara dengan 96.42%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian meliputi kinerja perusahaan, Tingkat Utang, dan biaya operasional mampu menjelaskan perubahan variabel dependen pajak penghasilan badan sebesar 96.42%. Sementara itu, sisa sebesar 3.58% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.971974	Mean dependent var	26.08745
Adjusted R-squared	0.964204	S.D. dependent var	1.211420
S.E. of regression	0.229198	Akaike info criterion	0.085276
Sum squared resid	5.305690	Schwarz criterion	0.724957
Log likelihood	23.45704	Hannan-Quinn criter.	0.345200
F-statistic	125.0994	Durbin-Watson stat	2.135272
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Berdasarkan Tabel 11., diperoleh nilai F-statistic sebesar 125.0994. Penentuan nilai F-tabel dilakukan dengan ketentuan jumlah variabel independen (K) sebanyak 3 dan jumlah pengamatan (n) sebanyak 130, sehingga derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = n - K - 1$, yaitu 126. Dengan demikian, nilai F-tabel yang diperoleh adalah sebesar 2,680. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-statistic lebih besar dibandingkan nilai F-tabel ($125.0994 > 2,680$). Selain itu, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja perusahaan, Tingkat Utang, dan biaya operasional secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 12. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.169558	2.547877	3.598902	0.0005
Kinerja Perusahaan	0.611876	0.092924	6.584691	0.0000
Tingkat Utang	2.820643	0.393462	7.168786	0.0000
Biaya Operasional	-0.596565	0.135246	-4.410965	0.0000

Sumber : data diolah dengan e-views 13, 2026

Berdasarkan Tabel 12, hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) sebesar 127, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,97882.

Kinerja perusahaan (X1) memiliki nilai t-Statistic sebesar $6,584691 > t\text{-tabel } 1,97882$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dapat diterima.

Tingkat utang (X2) memiliki nilai t-Statistic sebesar $7,168786 > t\text{-tabel } 1,97882$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dapat diterima.

Biaya operasional (X3) memiliki nilai t-Statistic sebesar $4,410965 > t\text{-tabel } 1,97882$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dapat diterima.

3.7 Pembahasan

Pengaruh Kinerja Perusahaan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) yang disajikan pada Tabel 10, diperoleh nilai F-hitung sebesar 125,0994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dibandingkan nilai F-tabel ($125,0994 > 2,680$) dan nilai probabilitas berada jauh di bawah taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis simultan (H_1) diterima. Artinya, kinerja perusahaan, Tingkat Utang, dan biaya operasional secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa besarnya PPh Badan yang terutang tidak ditentukan oleh satu kebijakan keuangan tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai keputusan manajerial yang saling berkaitan, sebagaimana telah dirumuskan dalam kerangka konseptual penelitian.

Diterimanya hipotesis ini secara teoretis mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan adanya hubungan kepentingan antara pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai agent dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kinerja perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya meningkatkan potensi pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. (Sintadewi, 2023). Selain itu, dalam kondisi asimetri informasi, manajemen sebagai pihak agent memiliki kewenangan dalam mengelola tingkat utang dan biaya operasional perusahaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut akan memengaruhi besarnya laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan, sehingga berimplikasi pada jumlah pajak yang terutang. (Sintadewi, 2023). Dengan demikian, pengaruh kinerja perusahaan terhadap PPh Badan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara simultan oleh kebijakan Tingkat Utang dan pengelolaan biaya operasional.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan Badan merupakan cerminan dari kombinasi kebijakan keuangan dan operasional perusahaan. Penggunaan hutang menghasilkan beban bunga yang bersifat deductible expense sehingga dapat menekan laba kena pajak, sementara biaya operasional yang dikelola secara agresif juga berpotensi menurunkan kewajiban PPh Badan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang sebanding. Model penelitian ini terbukti memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik (goodness of fit), di mana ketiga variabel independen tersebut secara kolektif mampu menjelaskan variasi Pajak Penghasilan Badan secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa bagi otoritas pajak dan regulator, pemahaman terhadap interaksi kinerja perusahaan, Tingkat Utang, dan biaya operasional menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal serta meminimalkan potensi perilaku oportunistik akibat asimetri informasi.

Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 11, variabel kinerja perusahaan memiliki nilai t-statistic sebesar 6,584691 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$), serta nilai t-statistic lebih besar dibandingkan nilai t-tabel ($6,584691 > 1,97882$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan diterima. Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa perubahan kinerja perusahaan akan diikuti oleh perubahan besarnya PPh Badan, dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai dasar pengenaan pajak. Kinerja perusahaan yang diukur melalui profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan operasional dan keuangan. Ketika profitabilitas meningkat, laba kena pajak yang dihasilkan perusahaan juga meningkat, sehingga beban Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja perusahaan memiliki peran sentral dalam menentukan kontribusi fiskal perusahaan terhadap penerimaan negara.

Dalam perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), temuan ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai agent. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laba yang dilaporkan perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan berupaya mengoptimalkan kepentingannya dengan mengelola laba dan beban fiskal. Ketika kinerja perusahaan meningkat

dan laba semakin besar, tekanan kewajiban Pajak Penghasilan Badan juga meningkat, sehingga mendorong manajemen untuk berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak guna menekan beban pajak tersebut. Asimetri informasi antara manajemen dan otoritas pajak memperbesar peluang terjadinya perilaku oportunistik tersebut.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni dan Arief (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal itu karena tingginya profitabilitas menunjukkan besarnya beban pajak penghasilan yang akan dikeluarkan entitas setelah dikurangi biaya-biaya yang boleh diperhitungkan dalam laporan fiskal. Serta penelitian dari Ningsih dkk, (2022), semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, karena pajak penghasilan badan akan dikenakan sesuai besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan, sesuai dengan prinsip ability to pay dalam perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat dugaan teoritis dan empiris bahwa kinerja perusahaan merupakan determinan utama dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan, sehingga peningkatan kinerja perusahaan tidak hanya mencerminkan keberhasilan operasional dan keuangan, tetapi juga berimplikasi langsung pada peningkatan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara.

Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 4.18, variabel tingkat utang memiliki nilai t-statistic sebesar 7,168786, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97882, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap PPh Badan diterima secara statistik, namun arah pengaruh yang dihasilkan adalah positif, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan arah hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat utang justru diikuti oleh peningkatan Pajak Penghasilan Badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada objek penelitian, penggunaan utang tidak semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana pengurang pajak melalui beban bunga, tetapi lebih diarahkan untuk mendukung ekspansi usaha dan peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga meskipun terdapat beban bunga sebagai deductible expense, laba fiskal perusahaan tetap meningkat dan berdampak pada naiknya PPh Badan terutang.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan, di mana manajemen sebagai agent tidak selalu menggunakan utang sebagai instrumen perencanaan pajak agresif. Dalam kondisi tertentu, utang digunakan sebagai sumber pendanaan produktif untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ketika dana utang dikelola secara efisien dan menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada beban bunga yang ditanggung, maka laba sebelum pajak akan meningkat, sehingga kewajiban Pajak Penghasilan Badan juga ikut meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat diminimalkan ketika penggunaan utang lebih difokuskan pada pertumbuhan usaha daripada penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Sembiring dkk, (2024) dan Sibarani dkk, (2024) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki kapasitas operasional dan laba yang lebih besar, sehingga berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis tingkat utang diasumsikan berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan, hasil empiris dalam penelitian ini menunjukkan arah pengaruh yang berbeda. Perbedaan ini menegaskan bahwa pengaruh tingkat utang terhadap PPh Badan sangat bergantung pada efektivitas penggunaan utang dalam menghasilkan laba, sehingga hipotesis penelitian diterima dari sisi signifikansi, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan dugaan awal.

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 4.18, variabel biaya operasional memiliki nilai t-statistic sebesar 4,410965, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97882, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap PPh Badan diterima, dan arah pengaruh yang dihasilkan sesuai dengan dugaan hipotesis penelitian.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional cenderung diikuti oleh penurunan Pajak Penghasilan Badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa biaya operasional berperan sebagai komponen pengurang laba fiskal yang signifikan. Biaya operasional, baik yang berupa biaya penjualan maupun biaya administrasi dan umum, merupakan deductible expense yang diakui secara fiskal, sehingga semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, semakin kecil laba kena pajak yang menjadi dasar pengenaan PPh Badan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agent. Pemerintah mengharapkan perusahaan menjaga efisiensi biaya agar laba bersih meningkat dan potensi penerimaan pajak negara bertambah. Namun, di sisi lain, manajemen memiliki kecenderungan untuk mengelola biaya operasional secara agresif sebagai strategi yang sah untuk menekan laba fiskal dan mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan. Dalam kondisi asimetri informasi, biaya operasional menjadi instrumen yang relatif fleksibel bagi manajemen dalam mengatur kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara konseptual, hubungan negatif antara biaya operasional dan PPh Badan juga dapat dijelaskan melalui sifat biaya operasional sebagai pengurang penghasilan bruto. Apabila peningkatan biaya operasional tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar, maka laba fiskal perusahaan akan menurun. Penurunan laba fiskal tersebut secara langsung berdampak pada menurunnya PPh Badan terutang pada periode berjalan. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan biaya operasional menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sjahputra dan Hunein (2024) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan secara proporsional akan menurunkan laba kena pajak dan berimplikasi pada penurunan beban PPh Badan terutang. Hasil serupa juga diperoleh oleh Tahir dkk, (2024) yang menyimpulkan bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin kecil dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh Badan, karena biaya operasional bersifat deductible expense yang secara langsung mengurangi laba kena pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat dugaan teoritis dan empiris bahwa biaya operasional merupakan determinan penting dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan, di mana peningkatan biaya operasional cenderung menurunkan beban pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya operasional tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan. Sampel penelitian terdiri atas 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja perusahaan diikuti dengan peningkatan PPh Badan. Tingkat utang juga berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan, yang berarti peningkatan tingkat utang diikuti dengan peningkatan PPh Badan. Sementara itu, biaya operasional berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan, yang menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional cenderung menurunkan PPh Badan terutang.

Referensi

1. Alamsyahbana, M. I., Sharon, S. S., Marlinda, C., Ramadhanti, R. J., Wardhana, A., Murniati, S., Herlina, Satria, H., Tahir, I. B., Utami, R., Simanjuntak, J. E., Hidayati, A., Kurnia, S., Chartady, R., & Wahid, N. N. (2024). Analisis Kinerja Perusahaan (Nomor January).
2. Anggraeni, N. A., & Arief, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Di Bei -. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 583–594. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14653>
3. Apipih dan Endah, F. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan *jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 464–475. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6485/3097>
4. Aryawati, N. P. A., Harahap, D. T. K., OKa, I. Ma. N., & Widiniasih, D. M. (2022). Manajemen Keuangan. In Tahta Media Group. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/9015/Book-Chapter-Manajemen-Kuangan.pdf>
5. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of Financial Management* 16e (16 ed.). Cengage.
6. Corporate Finance Institute. (2020). *Financial Ratios eBook Table of Contents*. CFI (Corporate Finance Institute), 1–37.
7. Dewanti, D. (2023). *Metode Statistika Populer untuk Penelitian*. Exsight. www.exsight.id
8. Febriana, N., & Yusuf, N. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(2), 899–921. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v2i2.245>
9. Fitriya. (2024). Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Tarif dan Contoh Hitung. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
10. Garrison, Noreen, & Brewer. (2021). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill Education.
11. Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbali, M. (2020). *PANDUAN PRAKTIS EKONOMETRIKA Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10* (Cetakan pe).
12. Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. In A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.), CV. Pustaka Ilmu Editor: (Vol. 5, Nomor 1). CV. Pustaka Ilmu Editor:
13. Iba, Z. (2024). Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0. In P. D. Mahir Pradana (Ed.), *Cv.Eureka Media Aksara* (Nomor July). Cv.Eureka Media Aksara. http://fe.unisma.ac.id/MATERI_AJAR_DOSEN/EKOMETRIK/AriRiz/MA_Uji_Normalitas.pdf%0Ahttps://adalah.co.id/uji-asumsi-klasik/
14. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 4, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
15. Kalventri, M., & Mulyani. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v1i11.857>
16. Kurniati, D. (2024). Kinerja PPh Badan Sanggup Tumbuh 20,3% di 2023, Sri Mulyani Bilang Ini. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799582/kinerja-pph-badan-sanggup-tumbuh-203-di-2023-sri-mulyani-bilang-ini>
17. Liow, F. E. R. I. (2023). *Kinerja Keuangan Perusahaan (Mokoginta (ed.))*. Yaysan Penerbit Muhammad Zaini.
18. Madjid, Z. (2025). Digitalisasi Pajak Belum Maksimal, Coretax Perlu Segera Diperbaiki. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250616114318-4-641314/digitalisasi-pajak-belum-maksimal-coretax-perlu-segera-diperbaiki>
19. Nainggolan, E. P., & Febriansyah, A. R. (2021). Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2019. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 1(1), 1–8.
20. Ningsih, N. H., Aprianto, A., & Solehayana, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 77–88. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9369>
21. Nisya, F. A. (2024). Pengaruh Biaya Operasional dan Gross Profit Margin terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(1), 24–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i1.89>
22. Nurfadillah, S., & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 591–609. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.165>
23. online.pajak.com. (2025). *Persiapan SPT Tahunan PPh Badan: Tarif, Rumus, dan Dokumen yang Perlu Dipersiapkan*. [Onlinepajak.com](http://online.pajak.com).
24. Pamungkas, L. B., Sumiyarti, S., Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP Pph BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.386>
25. Pangaribuan, D., & Marundha, A. (2022). *Akuntansi biaya*. CV. Pena Persada Redaksi.
26. Payadnya, I. P. A. A., & Jayantika, I. gusti A. N. T. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS*. In *Sustainability (Switzerland)* (Pertama, Vol. 11, Nomor 1). Penerbit Deepublish.
27. Priyono, E. (2025). *Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi*. *DJP Online Publication*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi?>
28. Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akutansi*. In CV. Merdeka Kreasi Group (1 ed., Vol. 0, Nomor 1, hal. 22–29). CV. Merdeka Kreasi Group.
29. Putri, R. E. P., & Kusumastuti, S. Y. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Operating Costs on Corporate Income Tax Expense Payable on Construction Companies Period 2014-2023. *PENANOMICS: International Journal of Economics*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.56107/penanomics.v3i2.176>
30. Sembiring, Y. C., Ginting, R. J., & Sitanggang, A. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industribarang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *10(2)*, 219–233.
31. Sibarani, P. R., Siagian, H. L., Hutapea, J. Y., Ekonomi, F., & Indonesia, U. (2024). The Effect Of Green Accounting And Capital Structure On Corporate Income Tax Payable In Idx80 Index Companies. *7*, 6570–6582.
32. Sintadewi, F. T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *5*, 51–65.
33. Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69–79. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.784>

34. Somopawiro, D. L., Sudjiman, L. S., & Maruli, R. S. (2024). Pengaruh Deferred Tax Dan Tingkat Utang Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Sri-Kehati 2021-2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5802–5818. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9561>
35. Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.55606/jurima.v2i1.174>
36. Sugiyono, P. D. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D* (S. p. Dr. Ir. Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA cv.
37. Tahir, F., Cusyana, S., & Nurwati. (2024). Pengaruh Pendapatan , Biaya Operasional , Gross Margin , Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2019 - 2022. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jakarta*, 6(1), 118–133.
38. Tresnawaty, N., & Merlawati, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Prosiding*, 4, 60–70. <https://doi.org/10.59134/prosidng.v4i.551>
39. Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Sumiyarti, Sudrimo, S. nofriska, Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, & Hulu, D. (2024). *BUKU AJAR EKONOMETRIKA* (Efitra (ed.); cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
40. Wildan, M. (2024). Industri Manufaktur Tertekan, Setoran Pajaknya Turun 13 Persen. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804759/industri-manufaktur-tertekan-setoran-pajaknya-turun-13-persen>
41. Yohana Magdalena, Agustiawan Agustiawan, & R. Septian Armel. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang pada Perusahaan Pertambangan (Periode 2020-2022). *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 434–454. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3581>
42. Yuliara, I. M. (2024). Regresi Linier Sederhana dan Berganda. In *Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Udayana* (Nomor July). <http://www.mendeley.com/research/regresi-linier-berganda-1/>